

FAKTOR-FAKTOR BUDAYA, PSIKOLOGI DAN SOSIAL EKONOMI PENYEBAB KEMISKINAN PADA MASYARAKAT TANI DI DAERAH NANGA-NANGA KOTA KENDARI

Oleh: Syaifudin Suhri Kasim¹, Megawati A. Tawulo², Sarmadan³

¹Program Studi Sosiologi Universitas Halu Oleo Kendari

^{2,3}Program Ilmu Kesejahteraan Universitas Halu Oleo Kendari

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor budaya, psikologis, dan sosial ekonomi penyebab kemiskinan pada masyarakat tani di daerah Nanga-Nanga Kecamatan Baruga Kota Kendari. Pendekatan penelitian ini ditinjau dari aspek sosial budaya dan ekonomi. Aspek sosial budaya dan ekonomi menggunakan dua macam metode: survey dan *participatory rural appraisal* (PRA). Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber data terkait, seperti laporan dan dokumen-dokumen, publikasi dan laporan hasil-hasil kajian sejenis. Sedangkan data primer dikumpulkan dari informan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskripsi, yakni penjelasan terhadap gejala-gejala sosial yang dipelajari yang didasarkan pada data empirik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor budaya meliputi: kebiasaan hidup, disiplin kerja, etos kerja yang lemah, kejujuran, pola bercocok tanam, filosofi hidup, dan pola pikir masyarakat; (2) Faktor sosial, disebabkan karena umumnya mereka adalah ekstrapol yang selama masa Orde Baru diperlakukan berbeda dengan masyarakat pada umumnya, dan kurangnya akses mereka pada sektor formal sehingga mempengaruhi sikap mental mereka untuk keluar dari kemiskinannya; dan (3) Faktor sosial ekonomi meliputi: modal usaha, akses terhadap pasar, kepemilikan alat produksi, pengolahan lahan, kepemilikan lahan, kualitas sumber daya petani, masalah ekonomi dan jual beli lahan.

Kata Kunci: Budaya, Kemiskinan, Psikologi, Sosial Ekonomi.

PENDAHULUAN

Berbagai program pembangunan dan bantuan lainnya selama ini untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan, tetapi dalam kenyataannya penduduk miskin sedikit sekali mengalami perubahan. Kerancuan selama ini terletak pada cara pandang kita mengenai faktor-faktor yang menyebabkan orang Indonesia dalam kekurangan (*deprivation*) dan rentan (*vulnerable*) yang disebut sebagai miskin (*poverty*). Asumsi yang dipakai, bahwasannya masyarakat itu kreatif, inovatif dan jujur. Masyarakat juga sebagai suatu entitas yang lugu dan jika mereka terbelakang, semata-mata akibat dari perlakuan Negara yang tidak memberikan sarana, prasarana dan modal untuk membangun diri mereka (*empowerment*).

Faktor-faktor di atas bukanlah penyebab utamanya, tetapi persoalannya sekali lagi, selain persoalan kurang modal, ketidakadilan pasar, ketimpangan dalam penguasaan alat produksi, keterbatasan kesempatan, kualitas SDM yang rendah, dan belum sepenuhnya menguasai teknologi perdesaan yang menyebabkan mereka jatuh miskin. Faktor lain, adanya kebiasaan hidup boros, tidak disiplin, enggan bekerja keras, sikap mental yang tidak jujur dan amanah, merupakan beberapa faktor lain

yang merupakan produk budaya yang cukup dominan dalam kelompok-kelompok masyarakat miskin di Indonesia.

Sehingga persoalan pengentasan kemiskinan pada masyarakat tani miskin khususnya, bukan hanya sekedar memberikan bantuan modal semata-mata kepada mereka, tetapi jauh lebih penting sebelum program tersebut dilakukan, adalah mengubah sikap mental mereka. Sebab dalam kenyataannya, jika akar masalah ini tidak diatasi lebih awal maka program bantuan yang diberikan pada petani tidak akan berhasil. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman lapangan, ditemukan bahwa penyebab kemiskinan masyarakat dapat saja bersumber dari faktor-faktor budaya, psikologis, sosial dan ekonomi, yang sekaligus mempengaruhi sikap mental mereka untuk berubah kearah yang lebih baik secara ekonomis.

Baswir (1999) membedakan kemiskinan atas kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat atas dasar perbandingan tingkat pendapatan antara suatu kelompok masyarakat tertentu dengan kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan kemiskinan absolut adalah suatu keadaan kemiskinan yang ditentukan dengan terlebih dahulu menetapkan garis kemiskinan (*povertyline*), dan yang disebut sebagai masyarakat miskin adalah mereka yang berada dibawah garis kemiskinan.

Eitzen dan Zinn (1993) serta Sarman (1997), mengartikan kemiskinan sebagai kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Amartya Sen dalam Meier (1989) mengatakan, kemiskinan bukanlah sekedar lebih miskin dari yang lain (kemiskinan relatif), tetapi lebih kepada tidak dimilikinya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material secara layak, atau dengan kata lain, kegagalan untuk mencapai tingkat kelayakan minimum tertentu. Erwidodo (1999) juga menyatakan, keterbatasan modal dan akses terhadap lembaga keuangan merupakan masalah yang cukup serius yang membuat masyarakat miskin semakin tidak berdaya.

Sumodiningrat (2002) mengatakan, ada dua faktor utama penyebab kemiskinan dan ketidak berdayaan (*powerless*), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut permasalahan dan kendala dari dalam individu atau masyarakat miskin yang bersangkutan, seperti: rendahnya motivasi, minimnya modal, lemahnya penguasaan aspek manajemen dan teknologi. Faktor eksternal meliputi: belum kondusifnya aspek kelembagaan yang ada disamping masih minimnya infrastruktur dan daya dukung lainnya sehingga potensi-potensi yang dimiliki masyarakat tidak dapat ditumbuh-kembangkan.

Oleh karena itu, kemiskinan sebenarnya tidak berdimensi ekonomi saja, tetapi juga berdimensi sosial budaya, psikologis dan politik. Bahkan menurut Baswir (1999) komplikasi masalah kemiskinan tampak dari kenyataan bahwa disekitar kita memang terdapat kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor kultural dan natural, tetapi di pihak lain, faktor-faktor struktural ternyata juga memainkan peranan yang cukup penting dalam mendorong munculnya masalah kemiskinan. Hal tersebut menjadikan

fenomena kemiskinan memang harus dilihat dalam perspektif yang lebih komprehensif, bukan parsial. Sehingga, kemiskinan sebenarnya lebih bersifat multi dimensi dan saling terkait antara faktor budaya, psikologi dan sosial ekonomi.

Bank Dunia (1990) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperoleh standar hidup minimal. Standar kebutuhan dasar untuk masing-masing negara berbeda-beda., PBB menetapkan bahwa batas kemiskinan dihitung dari pendapatan hariannya, yaitu \$2/orang/hari. Sementara BPS menentukan batas kemiskinan dari jumlah rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan, yaitu 2.100 kalori/orang/hari (Kuncoro, 2003). Penduduk miskin sebagian besar terdapat di pedesaan dan kebanyakan di antara mereka adalah rumah tangga yang pekerjaan utamanya disektor pertanian (Burki, 1991; Dillon dan Hermanto, 1993).

Senada dengan ungkapan Burki, Jazairy Idris (1992) yang melakukan penelitian mengenai masalah kemiskinan pedesaan di beberapa negara berkembang di dunia, mengidentifikasi rumah tangga miskin di daerah pedesaan umumnya adalah petani pemilik lahan pertanian sempit yang sering kali menghuni lahan-lahan marginal dimana hasil produksi pertanian yang ada tidak mencukupi. Secara umum terdapat beberapa definisi kemiskinan dan kriteria garis kemiskinan yang digunakan saat ini. Oleh karena itu, dalam melihat kemiskinan suatu masyarakat tani harus dilihat secara multi dimensi yang mencakup dimensi politik, sosial, budaya, psikologi, dan ekonomi, yang mana di dimensi tersebut saling terkait dan saling mem-batasi satu sama lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Nanga-Nanga Kecamatan Baruga Kota Kendari. Pendekatan penelitian ini ditinjau dari aspek sosial budaya dan ekonomi. Aspek sosial budaya dan ekonomi menggunakan dua macam metode: survey dan *participatory rural appraisal* (PRA). Survey dilakukan untuk mengetahui permasalahan umum yang terdapat didaerah kajian. Sedangkan PRA, yakni bertujuan mengkaji masalah-masalah masyarakat secara bersama-sama oleh peneliti (orang luar) dengan masyarakat (orang dalam) (Sevilla, 1993). Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber data terkait, seperti laporan dan dokumen-dokumen, publikasi dan laporan hasil-hasil kajian sejenis. Sedangkan data primer dikumpulkan dari informan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskripsi kualitatif, yakni penjelasan terhadap gejala-gejala sosial yang dipelajari yang didasarkan pada data empirik.

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini dikemukakan beberapa faktor budaya, kendala-kendala psikologis dan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi sikap mental masyarakat tani di daerah Nanga-Nanga sebagai berikut:

Faktor Budaya

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sikap mental masyarakat tani miskin di Daerah Nanga-Nanga, diantaranya:

Kebiasaan Hidup

Kebiasaan hidup merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap mental masyarakat setempat untuk dapat menjadi berkembang. Sebab secara umum pada tiga daerah pemukiman ditemukan bahwa distribusi dari hasil pertanian menurut kenyataan yang ada, sebahagian besar masyarakat menggunakannya hanya untuk semata-mata memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi mereka, dan tidak ada sedikitpun ada keinginan masyarakat untuk menyisihkan sebagian dari hasil pertanian mereka ataupun dari hasil usaha lain yang mereka peroleh, dan hanya sekitar 10% dipakai untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Untuk masyarakat Bugis yang menempati kampung Amohalo sebagian besar dipakai untuk kebutuhan sehari-hari antara lain: kebutuhan makanan, pakaian, perhiasan dan sisanya dipakai kembali untuk modal pengelolaan lahan pertanian. Untuk masyarakat yang menempati kampung Nanga-Nanga keseluruhan dari hasil usaha pertanian dan usaha lainnya yang mereka peroleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya dan hanya sekitar 10% digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Untuk masyarakat di kampung Lamonggedo yang dihuni masyarakat etnis Tolaki seluruh hasil pertanian dan usaha lainnya yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari merenovasi rumah dan biaya anak-anak. Sehingga dari tiga daerah pemukiman tersebut tidak ditemukan adanya masyarakat yang menyisihkan sebagian dari hasil usahanya untuk ditabung dalam upaya untuk dapat mengatasi kebutuhan yang mendadak yang sewaktu-waktu bisa terjadi, seperti untuk biaya pengobatan jika ada anggota keluarga yang sakit, perkawinan dan terjadinya bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi, sehingga permasalahan yang seringkali muncul adalah masyarakat mudah terjebak pada renteiner atau bahkan menjual tanahnya sebagai modal satu-satunya yang mereka miliki.

Disiplin Kerja

Faktor lain yang dapat dilihat adalah disiplin kerja masyarakat setempat, terdapat suatu pola yang sama dari ketiga daerah pemukiman tersebut, di mana mayoritas petani dalam hal pemanfaatan waktu, kurang produktif. Tidak ada alokasi waktu yang jelas dan terpola dengan baik. Petani bekerja sesuai dengan kemauannya sendiri. Pada umumnya di waktu pagi mereka berangkat bekerja setelah sarapan pagi dan pada tengah hari mereka pulang istirahat shalat dan makan siang. Di antara mereka ada yang langsung turun kembali keladang atau sawah setelah makan siang dan shalat, tetapi sebagian lainnya ada yang turun kembali keladang atau sawah setelah shalat ashar, bahkan ada pula petani yang tidak ke kebun atau ke sawah lagi setelah makan siang di rumah.

Etos Kerja Yang Lemah

Mengenai etos kerja masyarakat dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat tani memiliki etos kerja yang lemah, sebab dilihat dari produktivitas kerja

mereka dalam mengerjakan sawah dan kebun yang dimulai dari waktu pagi hari sampai dengan siang yang hanya berlangsung rata-rata 4-5 jam dalam 12 jam perhari. Rendahnya produktivitas mereka disebabkan karena: rata-rata diantara mereka termasuk dalam kelompok usia tua yang kurang produktif lagi, lahan pertanian yang kurang subur, tingkat pendidikan petani rendah yang berdampak pada rendahnya keterampilan mereka.

Kejujuran

Menurut beberapa informan yang diwawancarai bahwa sikap mental dan kejujuran terutama penggunaan atau pemanfaatan bantuan pemerintah, pada umumnya masyarakat di daerah tersebut tidak mengelola bantuan yang diterimanya sesuai dengan tujuannya atau peruntukannya dengan baik. Karena ada asumsi bahwa bantuan tersebut adalah bantuan cuma-cuma yang tidak perlu dikembalikan kepada pemerintah.

Pola Bercocok Tanam

Khusus di kampung Nanga-Nanga dan Lamonggedo secara keseluruhan lahan yang dimiliki telah diolah, tetapi hasilnya tidak maksimal disebabkan beberapa hal, antara lain: Pola tanam campuran, dan penggunaan pupuk yang tidak memadai utamanya tanaman jambu mete. Sementara tanaman jambu mete umumnya sudah kurang produktif lagi, dan petani tidak memiliki kemampuan untuk membeli pupuk.

Sedangkan di perkampungan Amohalo yang mayoritas masyarakatnya adalah petani sawah surjan, baru bisa mengolah lahan 50% dari lahan persawahan yang potensial untuk diolah, sehingga hasil pertanian di daerah ini masih belum optimal. Apalagi saluran irigasi yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengairi sawah mereka sampai saat ini belum ada, yang ada baru bantuan pemerintah akan sumur bor artesis, yang jumlahnya tidak sebanding dengan luas persawahan yang diolah masyarakat setempat, sehingga yang terjadi hanya sebagian saja masyarakat yang berhasil sawahnya dan bisa mengusahakan untuk panen 2 kali setahun, sedangkan kurang lebih 260 Ha sawah petani belum bisa mendapatkan distribusi air kelahan-lahan persawahan mereka dan hanya mengharapkan dari air hujan yang turun sewaktu-waktu pada musim hujan, sehingga pada musim panas mereka mengusahakan tanaman jangka pendek seperti sawi, kacang panjang dan jenis tanaman lainnya sambil menunggu musim hujan berikutnya pada tahun berjalan. Tetapi kebanyakan dari tanaman ini juga mati pada musim panas, sehingga hasil pertanian dari usaha ini juga tidak pernah maksimal.

Filosofi Hidup

Filosofi hidup yang berhasil diungkap pada beberapa suku bangsa yang dominan bermukim di daerah tersebut menunjukkan bahwa Suku Bugis memiliki filosofi yang khas dalam upaya meningkatkan taraf hidup, yakni jika mau dipandang atau terangkat derajatnya maka kehidupan mereka harus layak. Sementara pada Suku Tolaki yang bermukim di perkampungan Nanga-Nanga dan Lamonggedo filosofi hidup yang dominan adalah kekeluargaan dan kebersamaan, dan apabila hasil pertanian mereka gagal maka tidak ada alternatif lain yang dilakukan kecuali

menunggu hasil dari tanaman jangka panjang yang umumnya sudah tidak produktif lagi, sehingga kondisi seperti ini memaksa mereka untuk mencari sumber-sumber kehidupan dari hasil hutan seperti mencari bambu bulu untuk dianyam jadi dinding jelajah dan dolken. Sedangkan pada suku-suku lainnya tidak ada filosofi yang mendasar yang dapat menjadi motor penggerak dan motivasi untuk lebih maju lagi dari keadaan sekarang ini.

Masyarakat petani di perkampungan tersebut sampai saat ini masih merupakan petani subsistensi. Artinya apa yang mereka usahakan saat ini hasilnya hanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. “Yang penting masih bisa makan, itu cukuplah bagi kami”. Demikian yang banyak diungkapkan oleh petani.

Pola Pikir

Faktor lain yang paling dominan menjadi penghambat masyarakat setempat, utamanya bagi masyarakat yang bermukim di perkampungan Nanga-Nanga adalah pola pikir yang susah berubah. Seakan-akan mereka terkungkung dengan kondisi yang ada. Hal ini disebabkan karena beberapa jenis tanaman yang telah coba diusahakan untuk ditanam dilahan-lahan yang ditempati tetapi hasilnya juga tidak pernah maksimal, bahkan seringkali mengalami gagal panen.

Faktor Psikologis

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa masyarakat di daerah penelitian terdiri atas tiga kelompok yang menempati lingkungan pemukiman yang berbeda satu sama lainnya. Pertama adalah kampung Nanga-Nanga yang dihuni 33 KK masuk dalam lingkungan RW 3 RT 7 dengan suku bangsa yang mendiami lingkungan tersebut, antara lain: Tolaki, Muna, Buton, Bugis, Jawa, dan Ambon. Kedua adalah kampung Lamonggedo yang dihuni oleh 63 KK masuk dalam lingkungan RW 3 RT 6 dengan suku bangsa yang mendiami wilayah tersebut adalah Suku Tolaki. Ketiga, adalah kampung Amohalo yang dihuni oleh 67 KK masuk dalam wilayah RW 8 RT 3 dengan suku bangsa yang mendiami wilayah tersebut 90% Suku Bugis dan sisanya 10% adalah Suku Tolaki.

Dari tiga kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pemukiman yang berbeda umumnya memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, dimana untuk kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah Nanga-Nanga pada umumnya adalah eks Tapol, sedangkan kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pemukiman Lamonggedo dan Amohalo adalah kelompok masyarakat pendatang dari luar daerah Kota Kendari. Oleh karena itu, ada perbedaan pengaruh psikologis diantara ketiga kelompok yang mendiami daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, khusus untuk kelompok masyarakat yang mendiami daerah pemukiman di Nanga-Nanga pengaruh psikologis pada sikap mental mereka cukup signifikan, disebabkan karena umumnya mereka adalah ekstapol yang selama masa Orde Baru diperlakukan berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Perbedaan perlakuan Negara pada mereka menyebabkan munculnya anggapan bahwa bagaimanapun upaya yang mereka lakukan untuk bangkit dari kondisi yang mereka hadapi saat ini, hasilnya tidak akan seperti yang mereka harapkan.

Selain itu, perlakuan Negara terhadap eks Tapol selama masa pemerintahan Orde Baru telah membawa dampak secara psikologis, sosial, ekonomi dan budaya terhadap kehidupan mereka sebagai warga masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Secara sosiologis masyarakat yang mengalami perlakuan secara marginal oleh Negara selama kurun waktu tertentu akan membentuk suatu budaya perilaku yang mempengaruhi sikap mental mereka secara langsung. Sikap mental tersebut terbentuk akibat adanya stigma yang terbangun dalam diri masing-masing anggota masyarakat yang menganggap bahwa mereka adalah warga masyarakat yang dipandang oleh Negara sebagai warga yang harus diperlakukan dan diberi ruang dengan kesempatan yang berbeda dengan warga masyarakat lainnya.

Khusus untuk dua perkampungan yaitu di pemukiman Lamonggedo dan Amohalo Kendala-kendala psikologis yang menjadi faktor penghambat sikap mental mereka untuk maju lebih bersumber pada masalah kepemilikan tanah yang kurang jelas. Ada beberapa warga yang belum bisa mengolah lahan yang mereka tempati secara maksimal disebabkan karena mereka secara hukum belum memiliki sertifikat akan kepemilikan yang sah terhadap tanah yang mereka tempati. Meskipun tanah yang mereka tempati sudah dibeli kepada pemiliknya melalui akta jual beli yang hanya diketahui oleh pemerintah setempat. Tetapi akhir-akhir ini sering kali muncul klaim warga dari pihak di luar pemilik tanah dimana awalnya mereka membeli yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah tanah adat atau tanah ulayat mereka, sehingga kondisi ini semakin membuat mereka dalam ketidakpastian akan kepemilikan tanah yang mereka tempati. Permasalahan ini mereka juga sudah sampaikan kepada pihak RT tetapi hanya sebatas direspon tetapi tidak ada penyelesaian sampai sekarang ini. Dan walaupun mereka akan mengurusnya sampai ke pihak yang berwajib tentu harus membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sementara mereka umumnya tidak mempunyai penghasilan tetap.

Dengan tidak adanya kepastian akan kepemilikan tanah secara sah telah menimbulkan beban psikologis bagi warga untuk mengolah lahan yang mereka tempati secara maksimal, dan umumnya mereka yang berada dalam lingkaran masalah ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, mereka bekerja disektor informal seperti menjadi buruh bangunan, mengojek, menjadi penggarap sawah dan mencari sumber-sumber dari hasil hutan disekitar kawasan pemukiman mereka.

Faktor Sosial Ekonomi

Modal Usaha

Dari hasil identifikasi di daerah sampel penelitian di tiga lokasi dengan tipe masyarakat yang heterogen di daerah Nanga-Nanga memperlihatkan bahwa, kepemilikan modal dalam mengolah areal perkebunan dan pertanian adalah modal sendiri. Kepemilikan modal yang dimaksud berupa lahan garapan, biaya pembersihan lahan dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah lahan. Masyarakat rata-rata memiliki tanah yang merupakan lahan garapan sekitar 1-2 Ha, sedangkan alat-alat yang dipergunakan dalam mengolah lahan perkebunan dan pertanian dapat

menggunakan alat yang sifatnya tradisional dan alat modern. Alat-alat tradisional berupa parang, pacul serta sabit. Kecuali di daerah Amohalo yang mayoritas adalah petani padi sawah dalam mengolah sawah menggunakan alat manual berupa luku (bajak) serta peralatan mesin berupa *hand traktor*.

Akses Pada Pasar

Berdasarkan hasil observasi lapangan, tidak ditemukan adanya lembaga-lembaga ekonomi yang secara resmi didirikan oleh pemerintah ataupun badan swasta yang berfungsi sebagai pemberi bantuan modal bagi petani. Selama ini jika ada warga yang menginginkan modal terpaksa harus meminjam kepada rentenir dengan bunga yang sangat mencekik. Kondisi semacam ini membuat masyarakat meskipun mereka berhasil dalam mengolah lahan pertaniannya, tetapi hasilnya hanya cukup untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga hasil dari pertaniannya tidak ada yang bisa ditabung sesen pun, dalam arti bahwa mereka hidup dalam kondisi “gali lubang tutup lubang”. Salah satu sistem yang juga masih dipraktekkan sampai saat ini adalah ”sistem ijon” yakni jaminan tertentu berupa hasil produksi pertanian dengan jalan mengambil sejumlah uang kepada rentenir, dengan jaminan bahwa hasil produksi tidak dijual pada pihak lain kecuali kepada orang yang telah mengutangkan uang kepada mereka.

Kepemilikan Alat Produksi

Alat-alat pertanian yang digunakan untuk mengolah lahan perkebunan bagi petani tradisional di tiga lokasi pemukiman menggunakan alat-alat yang merupakan warisan turun-temurun yaitu pacul, parang dan sabit.

Pengolahan Lahan

Pada masyarakat yang mendiami pemukiman Nanga-Nanga dan Lamonggedo umumnya lebih memilih mencari dolken di hutan ketimbang berkebun, karena salah satu penyebabnya adalah kondisi alam, yakni kondisi lahan yang kurang subur yang tidak cocok untuk dilakukan sistem perladangan/perkebunan. Lahan yang digunakan untuk perkebunan/perladangan hanya cocok ditanami tanaman jangka pendek (sayur-sayuran dengan pertumbuhan yang cepat) dimana hasilnya hanya untuk dimakan (memenuhi kebutuhan sehari-hari, itupun terkadang tidak mencukupi) dan tidak untuk dijual.

Beberapa lahan yang tersedia digunakan untuk menanam tanaman jangka panjang seperti mete dan cokelat, namun hasilnya tidak maksimal dan sering mengalami gagal panen yang pada akhirnya tanaman tersebut gugur dan sama sekali tidak menghasilkan.

Pada dasarnya, program pemerintah sebelumnya telah ada dalam rangka peningkatan produktivitas lahan, khususnya program dalam bentuk pemberian modal (bantuan dana) dalam rangka pengolahan lahan yang lebih produktif. Namun, modal yang diberikan dirasa kurang cukup untuk digunakan pada pengolahan lahan mereka. Menurut mereka modal yang diberikan harus lebih besar dari sebelumnya, sebab karena kondisi lahan yang kurang subur yang membutuhkan pengeluaran (pembelian bibit, pupuk, pestisida, dan lain-lain) yang relatif lebih besar, sehingga

membutuhkan bantuan modal yang relatif besar jika dibandingkan dengan bantuan modal yang diberikan pada daerah lain dengan kondisi lahan yang relatif lebih subur. Selain kendala modal yang kurang, kendala lainnya adalah tidak adanya fasilitas pendukung lainnya, seperti pengairan yang akan digunakan untuk menyirami tanaman mereka.

Adapun masyarakat yang mendiami pemukiman Amohalo kendala utama yang mereka hadapi bukan pada persoalan ketidak suburannya tanah, tetapi lebih pada masalah tidak adanya irigasi yang dapat mengairi sawah mereka, sehingga lahan-lahan yang produktif belum bisa diolah secara maksimal. Tercatat masih kurang lebih 200 Ha yang belum diolah oleh masyarakat setempat. Walaupun mereka menanam tanaman pala wija hasilnya pun tidak pernah maksimal disebabkan karena pada musim kemarau tanaman-tanaman yang mereka usahakan sering kali mati karena kurangnya air yang diperlukan untuk menyiram tanaman-tanaman tersebut.

Kepemilikan Lahan

Pada tahun 1977 dan 1978 oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah melakukan pembebasan lahan seluas 1.000 Ha di daerah Nanga-Nanga, yang diperuntukkan bagi masyarakat eks-Tapol yang berasal dari Sulawesi Selatan (Moncong Loe) dan Sulawesi Tenggara (daerah Lambuya). Setiap KK yang ada di Nanga-Nanga telah diberikan tanah seluas 2 ha yang juga dilengkapi dengan sertifikat (sertifikat diperoleh berdasarkan bantuan sebuah LSM). Selebihnya lahan tersebut menjadi milik pemerintah daerah dan milik beberapa warga yang telah diperjual belikan.

Untuk di daerah pemukiman Amohalo rata-rata masyarakat memiliki tanah dari hasil membeli pada warga lokal yang merupakan pemilik tanah setempat. Menurut warga, orang pertama yang datang ke daerah pemukiman tersebut sekitar tahun 1980-an adalah H. Pattoeng dan H. Lahaya. Mereka awalnya menggarap lahan persawahan dengan sistem tadah hujan sekitar 4-5 Ha, dan setelah berhasil mereka kemudian mendatangkan beberapa warga yang berasal dari Sulawesi Selatan untuk membuka lahan persawahan yang belum terolah dengan cara membeli kepada warga lokal pemilik lahan dimaksud. Sampai sekarang ini jumlah warga di kampung tersebut telah berjumlah 67 KK, dan 60 KK diantaranya adalah masyarakat suku Bugis dari Sulawesi Selatan.

Kualitas Sumber Daya Petani

Masyarakat yang bermukim pada ketiga daerah tersebut sekitar 62 lebih persen hanya mengenyam pendidikan sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sekitar 25 % yang dapat melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang berikutnya yaitu SMP, dan sisanya SMU. Kondisi semacam ini telah menyebabkan mereka tidak mempunyai keterampilan lain selain hanya bertani dengan pola-pola tradisional, meskipun sebagian sudah bercocok tanam secara modern namun masih sangat terbatas.

Permasalahan Ekonomi

Kondisi kehidupan ekonomi masyarakat di Nanga-Nanga (eks tapol) sangat memprihatinkan, karena berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini terjadi karena

mereka hanya mengandalkan hasil alam yang telah tersedia yang tumbuh secara alamiah. Masyarakat Nanga-nanga cenderung memilih masuk hutan mencari kayu dolken, kayu bakar dan bambu, ketimbang mengolah lahannya secara profesional. Alasannya karena untuk mengolah lahan biayanya cukup tinggi sementara hasilnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Artinya biaya pengolahan lebih tinggi daripada hasilnya. Kayu dolken dan kayu bakar adalah penghasilan sehari-hari masyarakat di Nanga-Nanga yang dikerjakan oleh laki-laki. Sementara para ibu-ibu setiap hari masuk hutan mencari bambu untuk dianyam menjadi jelaja (dinding). Dolken, kayu bakar, dan jelaja tersebut dijual. Hasil penjualannya untuk menutupi biaya hidup sehari-hari.

Satu batang kayu dolken biasanya dijual Rp.1.000, sedangkan jelaja, 1 (satu) lembarnya dijual berkisar sekitar Rp.7.000-8.000. Ini adalah penghasilan utama mereka untuk menutupi biaya hidup sehari-harinya. Oleh karena itu, jika mereka tidak masuk hutan maka tidak akan mendapatkan uang. Sementara uang tersebut untuk dibelikan kebutuhan sehari-hari, terutama beras. Selain penghasilan utama yang disebutkan di atas, masyarakat juga biasa menanam sayur-sayuran, seperti: kacang panjang dan sawi, tetapi hasilnya hanya cukup untuk dikonsumsi sendiri. Kalaupun ada lebihnya cukup dijual pada tetangga setempat. Masyarakat juga berladang menanam padi yang diolah secara tradisional. Dalam berladang padi tersebut panennya hanya sekali setahun. Itu pun sudah jarang yang melakukannya, bahkan akhir-akhir ini hampir tidak ditemukan lagi.

Setiap hari ibu-ibu hanya bisa membuat jelaja sebanyak 2 lembar, sebab membuat jelaja bukan pekerjaan mudah tetapi cukup rumit. Biasanya ibu-ibu bergerombol masuk hutan mencari bambu, bambu yang didapat dipotong-potong sepanjang 160 cm, kemudian dipecah-pecah, baru dianyam menjadi jelaja. Jadi kalau dalam sehari hanya 2 lembar yang bisa diselesaikan, maka bisa dihitung bahwa penghasilan yang didapatkan seharian bekerja hanya sekitar Rp.15.000.

Untuk lahan yang 2 hektar pada umumnya mereka tanam tumbuhan jangka panjang, terutama jambu mente. Hasilnya cukup menunjang kebutuhan hidup, tetapi hanya berbuah sekali setahun saja. Sehingga kebun jambu mente tersebut masih tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Demikian pula kondisi kehidupan ekonomi masyarakat di Lamonggedo, hampir sama yang dialami pada masyarakat di Nanga-Nanga. Kondisi perekonomiannya juga sangat memprihatinkan. Penghasilan sehari-harinya kurang lebih sama saja, yaitu untuk tanaman jangka panjang mengandalkan jambu mente, sedangkan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka masuk hutan mencari dolken, kayu bakar, dan bambu, disamping jasa ojek dan menjadi buruh bangunan.

Tetapi yang membuat masyarakat Lamonggedo agak lebih maju dibandingkan dengan masyarakat di Nanga-Nanga adalah sebagian kecil masyarakat di Lamonggedo selain menggantungkan hidupnya seperti yang telah disebutkan di atas, mereka juga punya keahlian lain, yang bisa menunjang penghasilannya, yaitu dengan menjadi tukang bangunan.

Tetapi permasalahan ekonomi di Amohalo tidak separah dengan di dua daerah pemukiman sebelumnya (Nanga-Nanga dan Lamonggedo). Masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat di daerah tersebut terletak pada belum adanya lembaga-lembaga ekonomi desa, seperti koperasi “simpan pinjam” yang dapat menampung dan menjamin hasil produksi mereka, sehingga mereka tidak terjebak dalam sistem ijon dan menjadi bulan-bulanan para renteiner kota.

Jual Beli Lahan

Sebelum adanya pembangunan pengerasan jalan di daerah perkampungan Nanga-Nanga, penjualan lahan masih kurang dilakukan oleh warga setempat, namun setelah pembangunan pengerasan jalan dilakukan oleh pemerintah, maka penjualan lahan mulai banyak terjadi. Ada beberapa alasan maraknya jual beli lahan tersebut, antara lain:

- a. Tidak jelasnya kepemilikan lahan, sehingga melahirkan berbagai pengakuan ganda mengenai status kepemilikan lahan tertentu. Lahan-lahan yang ada tidak memiliki sertifikat, sehingga melahirkan banyaknya klaim kepemilikan. Dan warga yang pertama kali mengklaim dapat menjual kepada pihak lain, klaim warga tersebut akan bekerjasama dengan RT/RW yang akan memberikan dukungan *secu rade facto* mengenai status kepemilikannya.
- b. Pada umumnya lahan-lahan yang dijual tersebut dibeli oleh warga yang berasal dari luar pemukiman Nanga-Nanga, yang kemudian oleh warga luar tersebut akan mengurus sertifikasi atas status kepemilikan lahannya.
- c. Tanah/lahan yang dijual dan tidak dibuatkan sertifikasi, maka tanah tersebut dapat dijual kembali oleh orang lain (warga lain) yang mengaku bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan juga dapat menjual kembali kepada pihak lain.
- d. Nilai penjualan harga tanah sebelum adanya pembangunan pengerasan tanah adalah sekitar Rp500/meter, namun setelah adanya pembangunan pengerasan tanah harga tanah adalah Rp3.000 sampai Rp5.000/meter (dilengkapi dengan sertifikat).
- e. Tanah/lahan yang telah dibeli pada umumnya tidak diolah secara produktif, namun dibiarkan sebagai aset jangka panjang yang sewaktu-waktu dapat dijual kembali kepada pihak lain.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut faktor-faktor budaya yang mempengaruhi sikap mental masyarakat untuk dapat maju antara lain: kebiasaan hidup, disiplin dalam bekerja, etos kerja yang kurang, kejujuran, pola bercocok tanam, filosofi hidup dan pola pikir. Sedangkan kendala-kendala psikologis lebih disebabkan karena adanya perlakuan yang kurang adil terhadap warga ekstapol dan kurangnya akses mereka pada sektor formal. Kemudian faktor-faktor sosial ekonomi mencakup: modal usaha, akses pada pasar, kepemilikan alat produksi, pengolahan lahan, kepemilikan lahan, kualitas sumberdaya petani, masalah ekonomi dan masalah jual beli lahan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka saran yang dapat kami kemukakan adalah pemerintah Kota Kendari perlu mendorong adanya perubahan sikap mental masyarakat setempat disertai dengan dukungan modal usaha, keterampilan, kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah sebagai modal produksi dan kepercayaan diri untuk dapat bangkit lebih baik lagi, sehingga prinsip-prinsip hidup yang membuat masyarakat tani tersebut tetap dalam kubangan kemiskinan dapat teratasi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrul Tawulo. 1994. *Sistim Pemilikan "Anahoma" dalam Masyarakat Adat Tolaki di Kabupaten Kendari*. Lembaga Penelitian Unhalu.
- Baswir, Revrisond. 1999. *Pembangunan Pedesaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Dalam *Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Burki.S.F. 1990. "Development Strategy for Poverty Alleviation" Asian Development Review, 8.
- Dillon. H.S. & Hermanto. 1993. *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*. Prisma (3) Jakarta LP3ES.
- Eitzen, D. Stanley dan Zinn, Maxine Baca. 1993. *Social Problems*. Fourth Edition. Allynand Bacon.
- Erwidodo. 1999. *Modernisasi dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan*. Dalam *Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Jazairi, Idris, et al. 1992. *The State of Worl Rural Poverty: Aninquiry In To Its Causes And Concequencies*. New York: Univ. Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: AMPYKPN.
- Lakebo, Berthyn, 1989. *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional Daerah Sultra*. Depdikbud.
- Meier, Gerald M. 1989. *Leading Issues in Economic Development*. Cambridge: Oxford University Press.
- Sarman, Mukhtar. 1997. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*: pelajaran dari Program IDT. Prisma 1 edisi Januari 1997, hal 33-41.
- Soimin, Sudaryo. 1994. *Status Tanah dan Pembebasan Tanah*. Sinar Grafika.
- Scott C, James. 1989. *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.
- Sevilla, G Consuelo, dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*, Penerjemah Alimuddin Tuwu. UI-Press. Jakarta.